



A-N-T-I

ALIANSA NASIONÁL TIMOR-LESTE BA TRIBUNÁL INTERNASIONAL
Aliansi Nasional Timor-Leste Untuk Pengadilan Internasional

lanarra.del@gmail.com atino@laohamutuk.org no moniz@jsmp.minihub.org

(+670) 77289241, 77402231, 77179655

Website: www.laohamutuk.org , www.jsmp.tl ka www.haktl.org

Pernyataan Pers

Peringatan 34 Tahun Pembantaian di Marabia (10 Juni 1980 – 2014) dan Hari Internasional Untuk Para Janda (23 Juni)



“Militer Indonesia membawa kakak saya untuk sekolah...dan bila sudah mendapatkan ilmu maka biarkanlah dia kembali ke Timor Leste, untuk melayani dan turut serta dalam proses pembangunan di negeri ini. Tetapi jangan-jangan dugaan itu terbalik ...dan mereka telah membunuh semuanya...maka tunjukanlah tulang-tulang mereka, agar kami dapat mengumpulkan tulang-tulang mereka untuk dimakamkan bersama para pejuang-pejuang lainnya”. (Amelia Brigada Sarmento, sebagai adik perempuan dari seorang korban bernama Mario Gusmão Freitas dengan kode MAU-SEITU).

Pembantaian Marabia terjadi pada tanggal 10 Juni 1980. Kesatuan Militer yang terlibat dalam kejadian tersebut yakni dari Komando Pasukan Sandhi Yudha Kapassandha/Kopassus). Pembantaian tersebut mengorbankan sekitar 121 jiwa yang terbunuh dan dihilangkan secara paksa. Dari jumlah 121 jiwa yang mati dan belum ada satupun dari Kopassus yang menjalani proses akontabilitas atas berbagai kejahatan dan kejahatan melawan kemanusiaan lainnya. Lebih parah, mantan anggota Kopassus, seperti Prabowo Subianto yang mana hari ini ada potensi untuk terpilih menjadi Presiden dan saat yang sama survivor bersama janda dan anak-anak yatim masih tetap menjerit dan terus tinggal dalam kondisi yang amat menyedihkan.

Meskipun belum ada informasi yang benar-benar menunjukkan bahwa keterlibatan Prabowo di Pembantaian Marabia, namun saat itu fakta bahwa dia (Prabowo) sebagai anggota Kopassus dan kenyataan menunjukkan ia berpotensi karena selalu mendapat kepercayaan dari atasannya. Ini menunjukkan bahwa ia terus mendapat promosi lantas mengikuti berbagai even di Amerika dan di Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan guna mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi.

Disamping itu, setelah dua tahun kemudian, Kopassus yang dipimpin oleh Prabowo terlibat di pembantaian terbesar di Kraras (Viqueque) pada tahun 1983. Dari beberapa saksi menuturkan bahwa setelah pembantaian di Kraras pada bulan Agustus 1983, Kopassus terus melancarkan operasi untuk menangkap masyarakat sipil yang takut dan sedang bersembunyi di wilayah Le-Oli/Distrik Viqueque, ditangkap oleh Prabowo dan para anggotanya pada

tanggal 10 September 1983. Orang-orang sipil diantaranya para lelaki muda lebih dari seratus orang termasuk anak-anak dieksekusi di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan Tahu-Been (di sebuah sungai dekat Kraras).

Pada tahun ini, keluarga korban, masyarakat bersama perwakilan dari Institusi Negara berkumpul untuk merayakan 34 tahun pembantaian tersebut. Terdapat juga dari perwakilan Pemerintah yang rencananya akan mendirikan sebuah Monumen di tempat pembantaian tersebut. Pada peringatan kali ini diawali dengan acara misa sesuai tradisi Katolik yang dipimpin langsung oleh Uskup Diosis Dili. Setelah misa para keluarga korban menaburi bunga dan menyalakan lilin sebagai ungkapan penghormatan pada mereka yang telah dibunuh. Pada peringatan kali ini dengan agenda: keluarga dan komunitas mendengarkan ceramah-ceramah dari otoritas Negara yang turut memberikan ekspresi solidaritas mereka tentang pembantaian tersebut.

Kalaupun demikian, dari keluarga korban yang kehilangan saudara, suami dan ayah mereka tidaklah rela dan bersedia untuk menabur bunga dan menyalakan lilin karena belum ada kepastian akan status mereka yang dihilangkan itu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Para keluarga korban juga mengharapkan dari Negara agar tidak hanya sebatas mendirikan monumen tetapi juga mendesak pemerintah Timor-Leste agar bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mencari keberadaan keluarga mereka yang masih terus hilang.

ANTI sudah berupaya untuk mendapatkan informasi dari Intstitusi Negara mengenai hasil pertemuan *Senior Official Meeting* (SOM) antara Timor-Leste dan Indonesia yang mana membahas juga tentang isu orang hilang, yang baru diselenggarakan di Bali-Indonesia pada bulan April 2014. ANTI melihat bahwa pertemuan SOM tersebut tidak menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan karena kedua belah pihak, baik dari Timor-Leste terutama dari pihak pemerintah Indonesia tidak serius dalam membahas isu orang hilang. ANTI sangat menyesal karena kedua Pemerintah lebih memprioritaskan untuk mendirikan Pusat Kebudayaan ketimbang persoalan orang hilang dan anak-anak yang masih terus terpisah dengan keluarga mereka.

Oleh karena itu, ANTI mendesak pada:

1. Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia agar terus bekerja sama untuk membentuk Komisi Pencarian Orang Hilang sesuai dengan rekomendasi KKP/CTF.
2. ANTI juga mendesak PBB terutama Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB agar tetap mengagendakan kejahatan melawan kemanusiaan yang terjadi di Timor-Leste pada agenda real/nyata dan prioritas untuk mencari mereka yang dihilangkan secara paksa dan berikan keadilan untuk mereka yang telah dibunuh.
3. Anti juga menghimbau kepada kawan-kawan aktivis dan solidaritas internasional agar tetap berjuang bersama mendesak, supaya terciptanya proses formal bagi aktor-aktor yang telah terlibat atas kejahatan melawan kemanusiaan di Timor-Leste demi terputusnya rantai impunitas agar ada kebenaran dan keadilan bagi rakyat yang telah menderita.

ANTI yakin bahwa jika tidak ada keterlibatan dari masyarakat internasional ini merupakan tantangan berat pada kita semua untuk mengakhiri kejahatan melawan kemanusiaan di Timor-Leste selama pendudukan militer Indonesia di Timor-Leste.

Keadilan untuk Timor-Leste dan keadilan pada Dunia.

Dili, 23 Juni 2014

A handwritten signature in blue ink that reads "Sisto" with a horizontal line underneath the name.

Sisto dos Santos
Koordinator